

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8
TAHUN 1999 TERHADAP WANPRESTASI JASA DI PT.
NINUL JAYA WISATA KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

Septiana Nadzifatul Yazidah

NIM. C02216065



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Septiana Nadzifatul Yazidah

NIM : C02216065

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Terhadap Wanprestasi Jasa Di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten
Kediri**

**Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.**

Surabaya, 06 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



Septiana Nadzifatul Yazidah

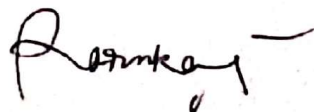
NIM. C0221605

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Nadzifatul Yazidah NIM. C02216065 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Agustus 2020

Pembimbing,



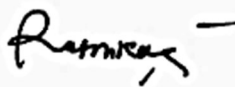
Drs. H. Akh Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septiana Nadzifatul Yazidah NIM. C02216065 telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

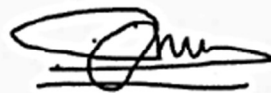
Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Drs. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 196509231986031002

Penguji II,



Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

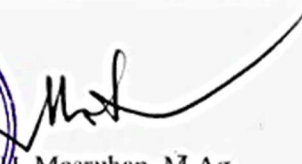
Surabaya, 19 November 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




I. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpusuinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septiana Nadzifatul Yazidah
NIM : C02216065
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : Septiananadzifatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Wanprestasi Jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kab. Kediri

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 November 2020

Penulis

Septiana Nadzifatul Yazidah
C02216065

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Wanprestasi Jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten Kediri** untuk menjawab pertanyaan yang diringkas menjadi pertanyaan bagaimana bentuk akad kerjasama dalam transaksi sewa -menyewa pelayanan jasa yang diberikan oleh PT. Ninul Jaya Wisata di Kabupaten Kediri, selanjutnya dalam sebuah usaha jasa yang di berikana oleh pihak perusahaan juga ada kelalaian yang ditimbulkan karena kesengajaan maupun tidak sengaja menjadikan sebuah masalah bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa-menyewa pemberian pelayanan jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten Kediri.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif yang menggunakan pola pikir induktif yaitu menjelaskan akad kerjasama yang dilakukan perusahaan dengan konsumen dalam pelayanan biro perjalanan wisata lalu di analisis dengan konsep *Ijtihad*

Hasil dari penelitian memberikan kesimpulan bahwa praktik akad kerjasama yang dilakukan oleh PT. Ninul Jaya Wisata ini sudah memenuhi akad kerjasama yang sesuai dengan Hukum Islam yakni *ija'ra*hukun dan syarat yang sah menurut *ija'ra*h tetapi belum sesuai dengan Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kelalaian perusahaan karena kelalaian disengaja maupun tidak sengaja yang menimbulkan pihak konsumen merasa dirugikan atas kelalaian pihak biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata.

Sejalan dengan paparan kesimpulan diatas, maka untuk lebih baik kedepannya penulis memberikan saran kepada pihak biro perjalanan wisata dan konsumen yang merasa dirugikan atas kelalaian yakni *pertama*, pemberian kompensasi atas kerugian sebaiknya secepatnya jangan melebihi batas waktu. *Kedua*, upaya penyelesaian wanprestasi seharusnya sesuai dengan kopensasi kerugian yang dibutuhkan konsumen. *Ketiga*, sebaiknya jika memberikan informasi itu harus jelas dan segera dibuat kesepakatan diawal akad kerjasama.

3. Jenis – jenis *Ija>rah*.....
4. Rukun dan Syarat-syarat *Ija>rah*.....
5. Kosekuensi Hukum Akad *Ija>rah*.....
6. Berakhirnya Akad *Ija>rah*.....
- B. Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Konsumen
 1. Hukum Perlindungan Konsumen
2. Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen
3. Pelaku Usaha
4. Asas – asas Perlindungan Konsumen
- C. Wanprestasi
 1. Pengertian Wanprestasi
2. Wanprestasi dalam Islam

**BAB III PROFIL DAN PRAKTIK SEWA – MENYEWA (*IJA>RAH*)
TERHADAP JASA PELAYANAN BIRO PERJALANAN *TOUR AND
TRAVEL* DI PT. NINUL JAYA WISATA KABUPATEN KEDIRI**

xi

1.1	Tabel pembiayaan sewa jasa pelayanan biro perjalanan
1.2	Tabel daftar armada yang disediakan perusahaan
1.3	Tabel daftar lembaga kerjasama perusahaan
1.4	Tabel keluhan dan Tindakan perusahaan

1.1	Tabel pembiayaan sewa jasa pelayanan biro perjalanan
1.2	Tabel daftar armada yang disediakan perusahaan
1.3	Tabel daftar lembaga kerjasama perusahaan
1.4	Tabel keluhan dan Tindakan perusahaan

1.1	Gambar logo perusahaan.....	45
1.2	Gambar struktur organisasi	49

1.1	Gambar logo perusahaan.....	45
1.2	Gambar struktur organisasi	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain, saling berinteraksi untuk saling memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk mempermudah hubungan antar makhluk sosial dapat melalui jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain lain. Dalam agama Islam hubungan antar manusia dapat disebut dengan *muamalah*. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup dengan sempurna tanpa jasa orang lain, dari sifat kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini munculah berbagai problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ritual dan sosial.

Menurut Kamus Hukum dan Yurisprudensi, Kata Muamalat memiliki arti tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antar manusia dalam bidang jual beli, sewa-menyewa, perburuhan, hukum tanah, hukum perikatan, hak milik, hak kebendaan, dan hubungan ekonomi pada umumnya.¹

Secara etimologi, kata *muamalah* adalah bentuk masdar dari ‘*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. *Muamalah* ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

¹ Fauzan, Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yuriprudensi* (Jakarta: Kencana, 2016), 147.

dan antara manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal kehidupannya.²

Dalam kehidupan ber*muamalah* manusia selalu berhubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Agama mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong, bekerjasama, dan bertukar keperluan sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan sebagaimana firman Allah dalam surat *al-maidah* ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَى وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا ءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah Swt dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *hadyu* dan binatang-binatang *qala'id* dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitulharam*: sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah irham, maka bolehlah berburu. Janganlah sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongnya berbuat melampaui batas (kepada mereka).. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

Ayat diatas mengandung arti tolong-menolong sesama manusia, seharusnya akad yang mengartika tolong -menolong atau dalam hal ini berarti akad sosial tersebut tidak boleh berorientasi pada keuntungan. Kegiatan *bermuamalah* banyak macamnya salah satunya yaitu *ija'rah*.

² Yazid, Muhammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press cet 1, 2014), 185.

³ Qur'an Kemenag, *Cordoba Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 106.

menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Ija>rahjuga dapat diartikan dengan *leas contract* dan *hire contract*.⁴ Akad

ijarah tidak boleh di palingkan, kecuali ada unsur manfaat.⁵ Dilihat dalam

objek $ija>ra$ berupa manfaat suatu benda yang di sebut dengan $ija>ra$ lain

yakni *ija'rah* yang berhubungan dengan penyewa benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak.⁶

Adapun yang menjadi dasar hukum *ija>rah*:

Q.S. *Al-Zukhruf* ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيَّةً ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.⁷

Hukum positif juga mengatur tentang adanya perlindungan untuk konsumen apabila si konsumen melakukan sewa menyewa setelah itu mendapatkan kecacatan barang sewa ataupun ketidaksesuaian permintaan

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 73.

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 131.

⁷ Kemenag RI, *Cordoba Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), 491.

Sewa menyewa jasa yang sering di perlukan pada era modern pada saat ini adalah usaha jasa sarana transportasi, biasanya transportasi rental mobil dan bis pariwisata. Usaha sewa jasa tersebut biasa disebut dengan jasa *tour and travel*. Sebelum menggunakan jasa sewa jelasnya di lakukan kerjasama antara pemilik (*musta'jir*) dan penyewa (*mu'ajir*) bisa tertulis maupun tidak tertulis. Setelah melakukan kerjasama, dalam hal ini sudah mulailah berlakunya hak dan kewajiban oleh masing masing pihak yang melakukan kerjasama. Pemilik memiliki hak dan kewajiban sebagai konsumen sedangkan penyewa memiliki hak dan kewajiban sebagai konsumen. Apabila dalam hal ini salah satu pihak melakukan hal yang tidak sesuai dalam kerjasama yang di tuangkan dalam kontrak bisnis tertulis maupun tidak tertulis maka melakukan penyelewengan dalam kerjasama bisa dikatakan melakukan kesalahan wanprestasi.

[illegible]

1. Paket wisata Yogyakarta meliputi tujuan Candi Borobudur, Keraton Yogyakarta, Pantai Parangtritis, Museum Dirgantara, Malioboro.
2. Paket wisata Lamongan meliputi tujuan Wisata Bahari Lamongan (WBL), Maharani *Zoo and Goa*,
3. Paket wisata Malang meliputi tujuan Jatim Park I, Jatim Park II, Museum Angkut, Batu Night Spectacular (BNS), Museum Tubuh, The Predator.
4. Paket wisata Puncak Gunung Dieng -Wonosobo
5. Paket wisata Bali
6. Paket wisata Jakarta dan Jakarta -Bandung

[illegible]

1. Praktik akad kerjasama transaksi sewa -menyewa dalam pelayanan jasa yang dilakukan oleh konsumen dengan PT. Ninul Jaya Wisata di Kab. Kediri.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa-menyewa jasa di PT. Ninul Jaya Wisata di Kab. Kediri ?
3. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang no. 8 tahun 1999 terhadap akad dan wanprestasi jasa di PT. Ninul Jaya Wisata di Kab. Kediri.

1. Bagaimana bentuk akad kerjasama dalam transaksi sewa-menyewa pemberian pelayanan jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kab. Kediri?
2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam transaksi sewa - menyewa pemberian pelayanan jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kab. Kediri?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-undang nomer 8 tahun 1999 terhadap wanprestasi jasa di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten Kediri?

Kajian pustaka ini adalah deskripsi yang secara ringkas tentang kajian atau hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah -masalah yang pernah di teliti sebelumnya sehingga jelas bahwa tulisan in bukan sebuah karya plagiasi atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

- ⁸ Aisyah, “*Penerapan Akad Kerjasama Dalam Transaksi Bisnis Tour And Travel Di Kota Malang (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

daripada madharatnya dalam praktik sewa jasa angkutan *pick up*, madharatnya muncul lebih besar apabila jasa angkutan diberhentikan/ditiadakan. Sewa jasa angkutan ini telah memenuhi syara'.⁹

3. Albab Zufan Baihaqi habibatul alumni program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya menulis skripsi pada tahun 2017, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemi lik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menggunakan akad *ijarah* pemilik diesel menyewakan dieselnnya kepada penyewa di tentukan sekalian harga sewa yang sesuai dengan luas sawah dan cuaca. Dalam setahun 3 kali masa tanam dan panen, harga berbeda setiap masanya persawah 2000 m² harga Rp 37.000, Rp. 46.000, dan Rp 55.500 harga tersebut di luar solar. Pada praktiknya saat pembayaran, petani meminta keringanan kepada pemilik diesel membayar upah sewa diesel pada saat panen tiba dengan menggunakan gabah basah. Ketika mengalami gagal panen pembayaran di bayar di masa panen yang akan datang, namun pada realitanya jumlah yang di bayarkan dengan gabah basah tidak sama dengan harga dengan jumlah total hutang petani yang d i

⁹ Mohammad Faisol Amin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up Di Kecamatan Kalinuwugu Selatan*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

1. Dalam praktiknya ada yang menggunakan titik pada akad kerjasama untuk melakukan transaksi.
2. Objek penelitian
3. Pembayaran upah sewa di bayar dengan menggunakan hasil panen dan di bayarkan di kemudian hari akibat mengalami gagal panen dengan jumlah yang kurang sesuai terhadap upah sewa.
4. Akad yang digunakan *syirkah* dan *ija'rah* yang menjadikan usul *masalah mursalah*.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hasil penelitian memperoleh manfaat bagi pembaca. Tujuan penelitian sebagai berikut:

- [illegible]

3. Untuk mengetahui analisis hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999 terhadap penyelesaian wanprestasi jasa *tour and travel* di PT.Ninul Jaya Wisata Kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dilakukan penelitian ini berharap agar memiliki kegunaan bagi pembaca, penulis, dan masyarakat terkhusus di kabupaten Kediri. Maka dari itu diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu Hukum ekonomi syariah, dalam arti menambah, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan bagi masyarakat khususnya bidang *muamalah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengembangkan pemikiran dan mengembangkan ilmu yang di dapat dalam akdemis perkuliahan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai bidang keilmuan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

b. Sumber Sekunder

1) Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

Untuk mempermudah dalam menganalisa data, dari hasil pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu hal menurut kenyataan apa adanya.¹⁷

Pola pikir yang di pakai adalah induktif, yaitu merupakan pola piker yang berpijak pada hal ini teori *ija>rahdan* Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang dilakukan dalam pelaksanaan praktik sewa menyewa antara pihak masyarkat dengan pemilik *tour and travel* di PT. Ninul Jaya Wisata Kabupaten Kediri.

[illegible]

[illegible]

[digilib.uinsby.ac.id](#)

[digilib.uinsby.ac.id](#)

digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id

[digilib.uinsby.ac.id](#)

BAB II

A. *Ija>rah*

1. Pengertian *Ijtihad*

Ija>rah menurut bahasa berasal dari kata *ajara ya'juru* yang artinya upah yang di berikan dalam pekerjaan. Sedangkan dalam istilah *ija>rah* adalah transaksi suatu manfaat mubah yang berupa barang sesuai tanggungan dalam waktu tertentu, at au dapat diartikan juga suatu transaksi atas suatu pekerjaan dengan upah yang diketahui.¹

*Ija>ra*huga dapat diartikan suatu transaksi sewa -menyewa atau upah- mengupah atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.² Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan atas suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan di sanggupi pembayarannya.³ Menurut kamus umum bahasa Indonesia sewa adalah

¹ Khariri Miftahul, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: MUKTABAH AL-HANIF, cet-4 2017), 311.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

³ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, cet-35, 2004), 381.

memberikan pinjaman sesuatu dengan memungut uang atau upah sewa dalam jasa maupun benda.⁴

Sedangkan menurut para ulama' memiliki berbagai pengertian, ulama' Syafi'iyah *ija>rah* adalah akad suatu akad yang mengandung manfaat tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan dibolehkan penggantian tertentu:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ فَابِلَةٌ لِلْبَلَدِ وَالْأَبَا حَةِ بَعْضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “ Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dilakukan dengan imbalan tertentu.⁵

Ulama' Malikiyah berpendapat *ija'rah* adalah memberikan suatu hak atas manfaat sesuatu yang mubah dalam waktu tertentu disertai imbalan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *ija'rah* (sewa-menyewa) adalah sebuah perjanjian atau akad timbal balik yang dilakukan untuk mengambil atau memiliki suatu pekerjaan atau benda dalam waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau upah.⁶

2. Dasar Hukum

Ija'rah merupakan salah satu hubungan timbal balik sesama manusia, Adapun sebagai berikut yang menjadi dasar legislasi akad *ija'rah* adalah *al-qur'an*, Hadits, dan *ijma'*:

⁴ <https://kbbi.web.id/> diakses 05 Juli 2020

⁵ Wahbahaz-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikhr, 1997), Jilid VI, hlm. 3800

⁶ Khairi Miftahul, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah 4 Madzab*, (Yogyakarta: MUKTABAH AL-HANIF, cet-4 2017), 312.

d. Upah.¹⁸

5. Kosekuensi hukum akad *ija>rah*

Setelah terpenuhinya syarat dan rukun *ijarah* maka untuk melandasinya perlu adanya kosekuensi hukum sebagai berikut:

a Status Akad

Status akad *ijā'rah* adalah *lazim* dari kedua pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*) artinya ketika akad telah terpenuhi syarat dan rukunnya, masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak dan tidak bisa di batalkan tanpa kesepakatan, sebab substansi akad *ijā'rah* sama dengan akad jual beli.

b Otoritas *Musta'jir*

Otoritas atau kekuasaan *musta'jir* atas obyek *ija'rah* yang ia sewa selama masa kontrak sifatnya adalah *amanah*. Demikian juga pasca kontrak apabila obyek tidak dimanfaatkan menurut *qaul ashah* kekuasaan *musta'jir* tetap *amanah*, sebagaimana otoritas seseorang penerima barang titipan (*muda'*) artinya *musta'jir* memiliki otoritas membawa obyek akad *ija'rah* dengan kepercayaan.

c Hak atas Ujrah dan Manfaat

Ujrah dalam akad *ijārah ‘ain* bisa dimiliki *mu’jir* sejak akad berlangsung (*bi nafsi al-aqd*), baik *ujrah* yang ditentukan (*mu’ayyan*) atau *ujrah* yang berada pada tanggungan (*fi dhimmah*). Hanya saja hak milik masih lemah dan bersifat potensial, dalam arti hak milik *mu.’jir*

¹⁸ Ibid., 118.

Ujrah dalam akad *ija>rah dzimmah* bisa dimiliki oleh *mu'jir* secara tetap atau permanen sejak akad berlangsung sebab akad *ija>rah dzimmah* tidak akan batal dengan kerusakan obyek *ija>rah*⁹

Dalam penggunaan jasa atau manfaat barang yang di sewa, *musta'jir* diperbolehkan mengganti dalam tiga hal yakni:

Yaitu orang yang menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa, sebab *musta'jir* berstatus sebagai pemilik jasa atau manfaat dari barang yang disewa, sehingga ia bebas untuk menggunakan sendiri atau menyerahkan kepada orang lain untuk menggunakannya sebagaimana ia diperbolehkan menyewakan barang yang disewa sepanjang tidak merugikan.

Yaitu barang yang akan dikerjakan menggunakan jasa atau manfaat barang yang disewa seperti muatan berupa tanah, pasir, beras, dll. Maka *musta'jir* boleh menggantinya dengan barang lain.

[illegible]

(*musamma*), sebab *ujrah* kesepakatan menjadi tidak mengikat ketika akad *ijarah* batal.²¹

adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b Hak-hak Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum hak-hak konsumen dikenal ada 4 hak dasar yakni:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk

1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.²⁴

3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang -undang lainnya.²⁵

²⁴ Ibid., 22-25.

²⁵ Ibid., 26-27.

Adapun kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 UU No. 8 tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

b. Hak-hak Pelaku Usaha

Dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha memiliki hak-hak sebagai berikut:

- ### c. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya .
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

[illegible]

- d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

1) Pertanggung jawaban pelaku usaha dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, serta mengonsumsi barang dan/jasa yang telah dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

²⁸ Ibid., 41-43.

Dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) perlindungan konsumen menganut 5 asas yakni:

- a. Asas Manfaat;
- b. Asas Keadilan;
- c. Asas Keseimbangan;
- d. Asas Keselamatan dan Keamanan konsumen ; dan
- e. Asas Kepastian Hukum.

[illegible]

Kecuali pada asas keempat, dijelaskan pada pasal 2 UUPK sebagai asas keselamatan dan keamanan konsumen menunjukkan bahwa perwujudan kepentingan ini bukan semata-mata dimanipulasi oleh motif “prinsip ekonomi pelaku usaha” (mendapatkan keuntungan maksimal dengan dengan biaya seminimal mungkin) artinya, tidak dibenarkan motif semata-mata untuk memupuk keuntungan (laba) dengan mengabaikan keselamatan dan keamanan konsumen dalam mengonsumsi produk barang dan/atau jasa.³⁰

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

[illegible]

- ### C. Wanprestasi

Wanprestasi menurut bahasa Belanda memiliki arti prestasi buruk, sedangkan menurut kamus hukum wanprestasi adalah berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.³² Wanprestasi dapat diartikan tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 578.

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- Melaksanakan akan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya
- Melaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan
- Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. ³³

a. Pengertian *Da>man aḥqd*

Dalam islam *daman al-aqd* dibedakan menjadi dua yaitu :

[illegible]

- 1) *Daman* akad adalah tanggung jawab perdata sebagai ganti rugi yang bersumber dari ingkar akad.
- 2) *Daman udwan* adalah tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber dari kegiatan yang merugikan atau dinamakan kegiatan yang melawan hukum.³⁴

b. Dasar Hukum *Daman al-aqd*

Al- Isra' 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”.³⁵

Al-Maidah 101

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن نَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.³⁶

c. Rukun dan Syaran *Daman al-aqd*

- 1) Pihak penjamin (*dhamin*) baligh, berakal, merdeka, dan cakap hukum

³⁴ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Warga Press, 2020), 160.

³⁵ Qur'an Kemenag, *Cordoba Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 285.

³⁶ Ibid., 124

Upaya-upaya penyelesain dalam wanprestasi apabila sudah kompleks maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

- Penyelesaian melalui jalur litigasi (*in court settlement*)
- Penyelesaian melalui non litigasi (*out court settlement*)

Dalam penyelesaian sengketa ada beberapa factor yang mempengaruhi diantaranya kepentingan (*interest*), hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*).³⁸

³⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana (Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual)*, (Jakarta : Pranadamedia Group, 2014), 90.

PROFIL DAN PRAKTIK SEWA MENYEWA TERHADAP JASA PELAYANA
BIRO PERJALANAN *TOUR AND TREVEL* DI PT. NINUL JAYA WISATA

1. Profil PT. Ninul Jaya Wisata

Setelah berkembang pesat perusahaan biro perjalanan PT. Ninul Jaya Wisata ini menjadi kepercayaan masyarakat serta pula lembaga-lembaga pendidikan maupun non pendidikan untuk melakukan perjalanan

43

Agar operasional berjalan dengan lancar dan tetap menjadi perusahaan biro perjalanan wisata *tour and travel* maka perusahaan PT. Ninul Jaya Wisata memiliki visi dan misi baik jangka Panjang maupun jangka pendek. Visi dan misi PT. Ninul Jaya Wisata adalah sebagai berikut:²

Menjadi perusahaan terdepan dan terbesar dalam bidang jasa pelayanan biro perjalanan pariwisata dengan kualitas pelayanan terbaik

[illegible]

B. Strategi pemasaran PT. Ninul Jaya Wisata

1. Produk

Produk biro perjalanan wisata merupakan berbagai jasa dimana satu dengan lainnya saling berkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata. Sebagai suatu produk yang kompleks, produk wisata tidak bisa disamakan dengan produk dan jasa lainnya. Kekhasan ini yang membuat produk wisata menjadi unik sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. Produk-produk biro perjalanan wisata antara lain:

a. Akomodasi

Segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan ketika berwisata. Akomodasi bisa berupa tempat missal penginapan yang lengkap dengan makan dan minum.

b. Transportasi

Sarana untuk mencapai tujuan wisata dan juga sarana pergerakan di tempat tujuan wisata (*the to reach the destination and also means of movement at the destination*). PT. Ninul Jaya Wisata transportasi sudah dipersiapkan berupa bis, elf, dan mobil rental.

c. Destinasi Wisata

Destinasi wisata merupakan daerah tujuan wisatawan dengan keadaan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang di dalamnya mengandung daya tarik. Misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, dan sebagainya.

- a. Dapat memberikan kemudian akomodasi dan transportasi sehingga para pelanggan akan merasakan kemanan dan kenyamanan saat berwisata.
- b. Pemandu wisata yang akan memandu sudah terlatih dan terbiasa.
- c. Biaya juga lebih murah terjangkau dan semua kebutuhan sudah menjadi paket jadi pengeluaran lebih efisien.
- d. Dapat mengunjungi obyek wisata pada saat yang tepat.

- a. Umumnya lebih mahal karena anda akan mengeluarkan uang sedikit lebih tinggi di banding kalau pergi sendirian
- b. Terikat waktu bagi yang tidak suka diatur waktu pasti merasa tidak nyaman karena umumnya perusahaan biro perjalanan sudah menetapkan waktu sesuai jadwal termasuk berapa lama di dalam wisata itupun juga diatur
- c. Jika sudah waktunya habis maka bisa jadi ada obyek wisata yang tidak di kunjungi.

Perusahaan dalam mendirikan biro perjalanan tetap memiliki struktur organisasi yang membantu dalam operasional perusahaan. Struktur di PT.

No	Nama Armada
1,	PO. Barokah
2.	PO. Luwes
3.	PO. Bojana
4.	Harapan Jaya
5.	HR. Transport
6.	Subur Jaya

Perusahaan sudah memiliki banyak pelanggan khususnya lebih banyak memiliki pelanggan kerjasama dalam bidang pendidikan untuk keperluan study tour, dimana study tour tersebut dikelola oleh panitia sekolah lalu pihak perusahaan menawarkan produknya. Berikut ini data pelanggan perusahaan jasa biro perjalanan di PT. Ninul Jaya Wiasata. ⁷

⁷ Ibid.

No	Nama Lembaga	Alamat
1	MTsN 3 Kediri	Jl. Pahlawan No. 74 Purwoasri, Kab. Kediri
2	Mts Al-Mutaqien	Jl. Pahlawan Bangsa No. 21 Bogo Kidul, Plemahan, Kediri
3	MTsN 1 Kediri	Jl. Stadion Canda Birawa 01 Toelongsrejo, Pare, Kediri
4	MAN 4 Kediri	Jl. Melati 14 Krecek, Badas, Kediri
5	SMK Ma'arif	Jl. Gajahmada 88, Semanding, Pare, Kediri
6	MTsN 2 Kediri	Jl. Raya Kanigoro. Keras, Kediri
7	MAN 2 Kota Kediri	Jl. Letjen Suorapto, Burengan, Pesantren, Kota Kediri

Keluhan Pelanggan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu k madrasah lembaga pendidikan yang merupakan pelanggan dari perus biro perjalanan PT. Ninul Jaya Wisata memaparkan bahwa mera mengalami kerugian dalam pemberian akomodasi dari perusahaan pihak sudah melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian kerja

Keluhan Pelanggan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu k madrasah lembaga pendidikan yang merupakan pelanggan dari perus biro perjalanan PT. Ninul Jaya Wisata memaparkan bahwa mera mengalami kerugian dalam pemberian akomodasi dari perusahaan pihak sudah melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian kerja

- ## Keluhan Pelanggan
- Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu k madrasah lembaga pendidikan yang merupakan pelanggan dari perus biro perjalanan PT. Ninul Jaya Wisata memaparkan bahwa mera mengalami kerugian dalam pemberian akomodasi dari perusahaan pihak sudah melakukan kerjasama dan menandatangani perjanjian kerja

⁸ Suselo Eko Rahayu (Ketua Panitia

¹³ Warsiati (Panitia SKAL MTsN 2 Kediri), *wawancara*, 16 Mei 2020.

6. Perjalanan Study Banding ke Yogyakarta dalam kerjasama dan jadwal tertera waktu mengunjungi ke Malioboro akan tetapi tidak di kunjungi dan tidak ada pengembalian ganti rugi.¹⁴

Paparan keluhan yang dialami pelanggan menggambarkan situasi perusahaan yang melakukan kelainan dan ketidaksesuaian terhadap kerjasama perusahaan dengan pelanggan atau konsumen. Pelanggan merasa mengalami kerugian dengan kejadian-kejadian di luar kerjasama tersebut. Tujuan perusahaan sebenarnya sudah baik dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang tertera di dalam kerjasama akan tetapi dengan kejadian yang tidak sengaja maupun dengan kesengajaan akan merugikan pelanggan. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi keluhan-keluhan ataupun kerugian, perusahaan memberikan kompensasi atau ganti rugi yang sesuai kesepakatan, tetapi dalam pemberian kompensasi atau ganti rugi kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tindakan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut pihak perusahaan melakukan yang terbaik untuk mengatasi keluhan pelanggan.

¹⁴ Saiful Anam (Panitia SKAL SMK MA Ma'arif), *wawancara*, 17 Mei 2020.

PT.Ninul Jaya Wisata memberikan keringanan kepada pelanggan dengan membayar terlebih dahulu uang muka, karena uang muka sebagai tanda terima jadi atas kesepakatan maupun isi pengajuan proposal dan siap melakukan perjalanan wisata dengan menggunakan jasa biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata, akan tetapi jatuh tempo untuk pelunasan harus segera dibayarkan seminggu sebelum keberangkatan. Biaya yang ditetapkan biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata ini masih dikategorikan standar dan wajar bagi pelanggan dibandingkan biro perjalanan wisata lainnya.

Dalam hal ini perusahaan dan konsumen melakukan kegiatan *muamalah* yang terdapat akad sewa-menyewa. Sewa-menyewa dapat disebut juga dengan *ija'rah* dalam hukum islam. *Ija'rah* merupakan perjanjian atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang dimaksud dengan akad *ija'rah* ini adalah telah memenuhi salah satu rukun *ija'rah* yakni biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata sebagai pemberi jasa (*ajir*), dan pelanggan sebagai penyewa (*musta'jir*).¹

Namun dari hasil penelitian penulis mendapati adanya masalah yang dalam hal ini lebih pada keluhan-keluhan pelanggan yang merasa dirugikan. Dirugikan dalam pelayanan dan juga tidak mendapatkan imbalan atas kerugian yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja. Dalam Al - Qur'an sudah tertera jelas bahwa melakukan kedzaliman dalam transaksi itu dilarang, dijelaskan dalam surah *al-shu'ari* ayat 183 Allah berfirman :

[illegible]

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”²

Dari sedikit penjelasan masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan segala usaha maka pelaku usaha dilarang untuk berbuat dzalim merugikan pelanggan. Maka menjadilah pelaku usaha yang jujur dan adil. Selain itu masih bisa dipaparkan Kembali analisis data dari segi syarat dan rukun, sebagai berikut :

a. Berakal dan *Baligh*

Pemilik biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata dan pelanggan merupakan orang yang telah berakal dan *baligh*. Dalam melakukan akad tidak sedang dalam keadaan yang tidak sadar.

Pihak penyewa dengan pemilik sewa jasa biro pelayanan PT. Ninul Jaya Wisata melakukan transaksi atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak perusahaan biro perjalanan wisata.

a. Obyek akad *ija'rah* mempunyai manfaat dalam hal ini obyeknya adalah jasa yang memiliki manfaat untuk melakukan perjalanan wisata bagi *musta'jir*.

² Qur'an Kemenag, *Cordoba Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 374.

- Jaya Wisata dan pelanggan.
- Obyek akad *ija'rah* milik *mu'jir* ataupun atas kuasa pemiliknya, perjalanan serta armada bis milik *mu'jir* sendiri.
 - Obyek akad dapat diserahkan terimakan kepada *musta'jir* baik secara langsung maupun bendanya dan dapat langsung digunakan. Praktik ini dilakukan oleh perusahaan biro perjalanan wisata PT. Nini Jaya Wisata ini memang berupa jasa pada awal transaksi tidak akan tetapi strategi marketing jenis armada bis, fasilitas, dan perjalanan wisata sudah dijelaskan ciri-cirinya.
 - Obyek akad *ija'rah* tidak cacat. Dalam praktiknya memang terjadi pada salah satu fasilitas yang tidak memenuhi pelanggan.

3. Dari *shigah* (*ijab dan qobul*)

Dalam praktik *ijab qobul* pada akad sewa jasa di biro perjalanan PT. Ninul Jaya Wisata ini dapat dilakukan dengan menghubungi nomer di kartu nama dapat diakses juga di media sosial fanpage facebook dan instagram. Kemudian pihak perusahaan mendatangi lembaga pelanggan untuk menyerahkan MOU tertulis lalu membuat kesepakatan kedua belah pihak, maka dari itu kedua belah pihak sudah sepakat atas ketentuan yang diperjanjikan. Mengenai pihak berakad, objek akad, serta *ijab qobul* diketahui jelas.

Kemudian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang juga diatur hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab ganti rugi untuk pelaku usaha apabila terjadi ketidaksesuaian dari pihak pelanggan atau disebut konsumen. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan ketentuan didalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan” dalam hal ini pihak perusahaan memberikan informasi tentang bagaimana isi perjanjian akad yang dilakukan dengan pihak konsumen.

Para pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian, baik karena perjanjian, undang-undang atau kepatuhan dan kebiasaan disebut prestasi. Hasil penelitian menggambarkan dari segi bentuk wanprestasi, melakukan apa yang sudah diperjanjikan akan tetapi terlambat. Perusahaan biro perjalanan wisata sudah memberikan informasi terkait proposal dan kerjasama yang dilakukan akan tetapi tidak di beritahukan jika terjadi pembatalan secara tiba-tiba yang disebabkan karna tidak kesengajaan setelah itu untuk kompensasi atau ganti rugi PT. Ninul Jaya Wisata melakukan apa yang menjadi tanggung jawab akan tetapi pemberian kompensasi atau ganti rugi melebihi tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 19 ayat (3) “pemeberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah selesai transaksi”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

[illegible]

Q.S As-Shaff (2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan ?”.⁴

Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah R.A

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

*“Tanda-tanda orang munafik ada tiga : ketika bercerita dia berbohong, ketika janji dia mengingkari, ketika dipercaya dia mengkhianati”.*⁵(HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59)

C. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 terhadap Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi jasa di PT. Ninul Jaya Wisata

Upaya biro perjalanan wisata PT. Ninul Jaya Wisata untuk menyelesaikan keluhan-keluhan pelanggan ataupun wanprestasi yang dilakukun, mengacu pada tanggung jawab sebagai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 19 ayat (1) dan (2) :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian

⁴ Ibid., 551.

⁵ Al-Imam Nawawi, bab XXV, *Riya>d asa>lihin* (Beirut: Dar al-khatib al-ilmiyah, 1971), 62.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, setelah diuraikan dan dianalisis, maka menghasilkan beberapa kesimpulan atas beberapa masalah yang dirumuskan :

1. Praktik akad kerjasama dalam transaksi sewa-menyewa merupakan perjanjian yang dibuat secara kesepakatan dan di tuangkan dalam bentuk kerjasama tertulis yakni berupa proposal dan surat perjanjian kerjasama.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan pihak PT. Ninul Jaya Wisata sudah sesuai dengan sistem penyelesaian sengketa menurut islam dengan mengambil keputusan damai, akan tetapi tidak sesuai dengan Undang-undang No.8 pasal 19 ayat (3)
3. Berdasarkan analisis hukum islam yang telah dikaji maka dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi sewa-menyewa yang dilakukan PT. Ninul Jaya Wisata adalah sah, karena telah sesuai dengan akad *ijarah* , rukun dan syarat *ijarah*. Kemudian berdasarkan analisis Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, praktik sewa-menyewa tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 huruf b mengenai pemberian informasi yang jelas tentang ketidakseuaian yang mungkin juga sering terjadi, yakni pembatalan tujuan wisata secara mendadak. Pertanggungjawaban pelaku usaha harus berpedoman

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah, Abu Na'im Ahmad Ibn. *Musnad Imam Abu Hanifah Riwayah Abi Na'im*. Juz 1 Riyadh: Maktabah Kautsar. 1415.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Al-Haiḡamy, Ali bin Abi Bakar. *Majma'azZawiid wa Manba'ualFawāid*. Beirūt: Daral Kutubal-'Aroby.1407H.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN SA Press. 2014.
- Faizin , Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Warga Press. 2020.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* . Jakarta: Grasindo. 2005.
- <http://hukumonline.co.id//> diakses pada tanggal 18 Mei 2020
- <https://kbbi.web.id/> diakses 05 Juli 2020
- Kemenag RI. *Ar-Rahman Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2014.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Miftahul, Khariri. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: MUKTABAH AL-HANIF. cet-4 2017.
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2017.
- Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 2001.
- Rahayu, Sutisna. *Syariah Islamiyah*. Bandung : IPB Press. 2015.

